

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tingkat efektivitas investasi non permanen dana bergulir pada Dinas Peternakan Kabupaten TTU periode tahun 2011-2013 mengalami fluktuasi. Target dan realiasi kelompok penerima dana bergulir hanya sebesar 46,66% sehingga penyaluran dana bergulir kepada 31 kelompok pemanfaat di katakana tidak efektif. Penyebabnya adalah ketidakmampuan kelompok dalam mengembangkan dana bergulir yang hanya mencapai 15,14%. Berbeda dengan indikator penyetoran/berguliran kembali dana bergulir mulai periode tahun 2011 mencapai: 79,89%, atau kurang efektif tingkat penyetoran dana bergulir. Pada tahun 2012 efektivitas penyetoran dana guliran sebesar Rp 469.500.000,00 atau 154,82%, sebanding dengan periode tahun 2013, sangat efektif penyetorannya atau mencapai 128,19%. Sedangkan dana yang telah disiapkan dari penyetoran untuk berguliran lanjut tidak dapat terukur karena ada perbedaan dana guliran yang dianggarkan dan realisasi penyetoran kembali dari kelompok.
2. Efektivitas dana bergulir periode 2011-2013 berdasarkan target dan realisasi dapat disimpulkan adanya proporsionalitas persentasenya pada tahun 2011 terdapat 72,9% dana bergulir yang diinvestasikan kepada

masyarakat. Sedangkan di tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 88,94%, dan mengalami defisit di tahun 2013 atau 88,14%.

3. Dampak Dana Bergulir terhadap kelompok penerima dan pemerintah daerah meliputi dampak negatif dan positif. Secara negatif dana gulir menimbulkan mentalitas konsumtif dan kurangnya tanggungjawab dalam penyeteroran/berguliran kembali. Dan bagi pemerintah, kurangnya pendampingan karena minimnya staf/pegawai berakibat pada minimnya usaha produktif kelompok. Sedangkan pada sisi positif, dana bergulir bagi masyarakat berdampak pada peningkatan ekonomi (adanya modal usaha) dan kesejahteraan hidup kelompok dan keluarga, meningkatnya pengetahuan kelompok, lapangan kerja serta kemajuan manajemen produktif dan wirausaha kelompok. Dan bagi pemerintah, dana bergulir secara langsung mendapat nilai tambah yaitu bunga yang disetorkan oleh kelompok ke kas dan berguliran lanjut.

## **6.2 Saran**

1. Bagi Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara SKPD terkait agar meningkatkan efektivitas bantuan dana bergulir dengan cara mengevaluasi kembali pelaksanaan dan pengelolaan dana bergulir melalui pendampingan dan pelatihan.
2. Bagi kelompok/masyarakat penerima agar lebih efektif mengelola dana bergulir yang diberikan oleh SKPD maupun pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhadi. (2010). *Dana Bergulir Pembangunan Rumah Di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar*. Tesis. Universitas DIPONEGORO
- Awe, Sesilia Sika Hajon. (2013). *Kajian Investasi Non Permanen Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur*. Skripsi. UNWIRA. Kupang
- Darise, Nurlan. 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta
- Halim, Abdul. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Halim, Abdul. (2008). *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Akuntansi Dana Bergulir*. Salemba Empat. Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Munir, Dasril, H, (2004). *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. YPAPI. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Suharso, Retnoningsih. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Widya Karya. Semarang.

Ulum, Ihyaul. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. UMM Press. Malang.

Wasito, Hermawan dkk. (1990). *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*. Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik. Jakarta.